

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesetaraan gender menjadi isu yang masih diperdebatkan sampai sekarang, bukan hanya di Jepang tapi di seluruh dunia. Namun, masih ada kesalahpahaman tentang konsep kesetaraan gender, di mana masih ada masyarakat yang menganggap hal ini merupakan kampanye untuk membuat perempuan dinomorsatukan di berbagai sektor. Untuk itu masyarakat perlu mempelajari dan memahami secara mendalam tentang apa itu kesetaraan gender yang sebenarnya.

Kesetaraan gender adalah kesetaraan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memiliki kesempatan, hak dan akses yang sama sebagai manusia untuk berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi dan sosial. Menurut jurnal Urgensi Undang-Undang tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (2014) karya Sali Susiana, kesetaraan gender tidak dipengaruhi oleh seksualitas atau jenis kelamin. Yang artinya kesetaraan gender bukan hanya milik perempuan saja tapi juga milik laki-laki, di mana laki-laki pun bisa menuntut hal serupa.

Namun, kuatnya ideologi yang menyatakan bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, hal ini membuat perempuan hidup dalam sistem dominasi yang kehidupannya berada dalam kontrol laki-laki dan harus terus memperjuangkan hak mereka sebagai perempuan agar tidak mendapatkan diskriminasi dari masyarakat. Hal inilah yang membuat para perempuan banyak memberikan kritikan mereka melalui gerakan feminisme untuk menuntut hak mereka sebagai perempuan agar diberi kebebasan dan hak yang sama dengan para laki-laki, baik di bidang hukum, politik, maupun ekonomi.

Feminisme sebagai kritik ideologis terhadap cara pandang yang mengabaikan permasalahan ketimpangan dan ketidakadilan dalam pembagian peran identitas sosial akibat perbedaan gender (Budianta, 2009:201). Dengan kata lain, feminisme merujuk pada kesadaran ketidakadilan gender yang dihadapi

perempuan baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat, di mana hal ini akan terwujud jika perempuan dan laki-laki bersatu untuk mengubah keadaan. Feminisme mulai menyebar ke seluruh dunia dan konsep ini pun menginspirasi para perempuan terutama perempuan di Jepang, untuk mendobrak hierarki gender yang sudah ada sejak lama.

Jepang memiliki budaya patriarki yang sudah ada sejak lama. Hal ini menjadi bukti bahwa ide mengenai gender di Asia, khususnya di Jepang, di konstruksi sedemikian rupa untuk membuat gender laki-laki menjadi sebuah gender yang memiliki kedudukan dan tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan. Terdapat sebuah ungkapan di Jepang yang menggambarkan stereotip yang bias gender seperti berikut, *Otoko wa matsu, onna wa fuji (a man is a pine tree, a woman is a wisteria)* (Takemaru, 2010: 3). Ungkapan tersebut memiliki arti bahwa perempuan bergantung pada laki-laki (pohon pinus) seperti wisteria (sejenis tanaman rambat berupa bunga berwarna putih atau ungu yang bergelantungan pada pohon pinus). Dengan kata lain, ide mengenai gender di Jepang membuat perempuan seakan-akan sebagai pihak yang hanya menjadi beban bagi laki-laki.

Perempuan Jepang pun sampai sekarang masih menuntut hak mereka. Namun, lagi dan lagi dengan adanya sistem patriarki yang masih melekat dalam masyarakat, semakin mempertegas ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Konsep yang berbunyi “laki-laki di luar, perempuan di dalam” atau “perempuan harus berada di dalam rumah” sudah ada sejak zaman Edo, perempuan juga tidak boleh membicarakan masalah yang ada di luar rumah karena sejatinya sesuatu yang berkaitan dengan luar rumah atau publik adalah urusan laki-laki. Perempuan cukup diam, dan tidak boleh ikut campur urusan yang ada di luar rumah dan hanya perlu mengurus masalah yang ada di dalam rumah saja.

Zaman Tokugawa (1603-1868), perempuan mengalami berbagai bentuk diskriminasi, dan yang paling menonjol adalah pembatasan pendidikan. Perempuan di zaman Tokugawa tidak diperbolehkan menerima pendidikan formal, karena hal ini banyak perempuan Jepang yang tidak dapat membaca atau menulis.

Sistem yang dianut Tokugawa adalah sistem feodal, sistem ini mempengaruhi struktur dan kondisi masyarakat serta bidang pendidikan itu sendiri. Pada zaman Tokugawa pendidikan di bidang militer dan pemerintahan menjadi prioritas, oleh karena itu pendidikan untuk perempuan sangat kurang. Pendidikan untuk perempuan pun hanya terbatas pada pendidikan yang diberikan oleh ibunya sendiri. Pada saat itu pun, perempuan tidak memiliki hak untuk memilih dengan siapa mereka akan menikah. Para perempuan terpaksa menikah dengan pasangan yang sudah dipilih oleh keluarganya, oleh karena itu tidak jarang beberapa perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Zaman Meiji (1868-1912), masih terjadi bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Pada ajaran Konfusianisme, perempuan dianggap sebagai objek penting dalam mengandung anak dan mengurus keluarga, bukan sebagai manusia yang pantas dicintai oleh pasangannya. Pada zaman Meiji, pendidikan untuk perempuan mulai membaik, meskipun hanya perempuan yang memiliki status sosial yang tinggi yang dapat mengenyam pendidikan. Sementara, perempuan kelas bawah hanya dapat membantu orang tua atau suami mereka bekerja di ladang, dan sebagainya. Sedangkan, perempuan kelas menengah ke atas masih memiliki akses yang terbatas untuk pendidikan. Mereka tidak dididik secara formal seperti laki-laki, tetapi mereka dididik untuk mengurus keluarga, memasak, dan banyak lagi. Namun, pada tahun 1872, Departemen Pendidikan Jepang memberlakukan sistem pendidikan yang disebut sistem Gakusei yang memuat rencana sistem pendidikan secara umum dan perempuan pun dapat menerima pendidikan dasar (Patessio, 2011: 40)

Selama Perang Dunia II, para perempuan diminta untuk mengisi kekosongan yang disebabkan oleh pengerahan tenaga kerja laki-laki, untuk mempertahankan ekonomi Jepang yang sedang mengalami kesulitan di masa perang. Pasca Perang Dunia II, Jepang menjalani perubahan dari berbagai aspek kehidupan mulai dari sosial, politik, maupun ekonomi. Upaya pemulihan bangsa yang mengalami kemunduran ekonomi dan moral ini menghasilkan pergeseran besar dalam pandangan gender di Jepang. Sejalan dengan perkembangan waktu, perubahan ini melahirkan gerakan untuk kesetaraan gender dan perjuangan hak-

hak perempuan yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Selain itu, perempuan mulai mendapatkan beberapa hak yang telah lama tertunda, seperti hak untuk memilih, dan mulai mengambil posisi sosial yang lebih bebas. Banyak perempuan mulai mengejar pendidikan tinggi dan memasuki karier yang membutuhkan keterampilan tinggi.

Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II pada tahun 1945, dikarenakan Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, hal ini membuat Jepang tidak berdaya. Jepang mengalami masa pendudukan oleh sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat dari tahun 1945 hingga 1952. Sekutu melakukan perubahan ekonomi dan politik yang berfokus pada demokratisasi dan modernisasi Jepang. Perempuan Jepang mulai mengalami pergeseran peran dari tradisional menjadi lebih terbuka terhadap kesempatan pendidikan dan pekerjaan. Misalnya, pada bidang sosial posisi perempuan Jepang terus membaik, Amerika juga mengeluarkan kebijakan untuk mengganti Undang-Undang Meiji menjadi konstitusi 1947 (Goodman, 2017:17). Meskipun ada kemajuan, norma-norma patriarki yang mendalam masih menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat.

第十四条すべて国民は、法の下の平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又財産により、政治的、経済的又社会的関係において、差別されず、華族その他の貴族の制度は、これを認めない。荣誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

Terjemahan:

Pasal 14. Semua orang sama di mata hukum dan tidak boleh ada diskriminasi dalam hubungan politik, ekonomi, atau sosial karena ras, kepercayaan, jenis kelamin, status sosial, atau asal usul keluarga. Tidak ada hak istimewa yang menyertai penghargaan kehormatan, tanda jasa, atau perbedaan apa pun, dan tidak ada penghargaan semacam itu yang berlaku setelah masa hidup orang yang menerima atau yang akan menerimanya di kemudian hari.

Konstitusi tersebut menyatakan bahwa semua orang sama di bawah hukum dan tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, kepercayaan, jenis kelamin, status sosial atau asal keluarga dalam hubungan politik, ekonomi atau sosial. Bangsawan dan kebangsawanannya tidak diakui atau tidak akan dikenali. Jepang mulai

membentuk negara yang sistem dan konstitusinya mendukung pemerintahan yang lebih demokratis. Oleh karena itu, perempuan Jepang dapat memiliki kesempatan yang sama dengan para laki-laki, meskipun masih ada perempuan yang tidak mengambil kesempatan tersebut karena mereka sudah terpaku dengan sistem patrilineal di mana sistem tersebut menganut kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki.

Secara keseluruhan, konteks sejarah Jepang pasca Perang Dunia II menunjukkan bahwa Jepang mengalami perubahan penting di berbagai tempat, yang kemudian membentuk ciri dan identitas Jepang yang berbeda dengan masa sebelum perang. Itu juga meletakkan dasar untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender di Jepang pasca Perang Dunia II. Meskipun pemerintah Jepang telah mengadopsi Undang-Undang dan kebijakan untuk melindungi hak-hak perempuan dan menegakkan kesetaraan gender pasca Perang Dunia II, diskriminasi terhadap para perempuan masih tetap ada dalam berbagai bentuk.

Sebelum perempuan menerima hak tersebut beberapa tokoh perempuan pelopor feminisme, seperti Toshiko Kishida (1863-1901) seorang perempuan yang diklaim menjadi salah satu feminis pertama di Jepang. Beliau aktif berkeliling Jepang untuk menyuarakan hak-hak perempuan pada masa pemerintahan Kaisar Meiji dan Hiratsuka Raichō (1886-1971) yang merupakan pelopor feminis dan aktivis politik. Namun, terlepas dari banyaknya perempuan yang telah meninggalkan jejak mereka dalam sejarah Jepang, tetap saja sebagian sejarah Jepang yang tertulis maupun tidak tertulis selalu berpusat pada laki-laki. Ideologi yang berpusat pada laki-laki berpengaruh dalam segala aspek yang ada di Jepang, termasuk dunia kerja dan hak pilih.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai kesetaraan gender dan perjuangan hak-hak perempuan di Jepang pasca Perang Dunia II. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui apa saja perjuangan para perempuan Jepang untuk mendapatkan haknya sebagai seorang perempuan pada pasca Perang Dunia II.

1.2 Penelitian yang Relevan

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, terdapat penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka, di dalam pendahuluan ini penulis akan memaparkan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian skripsi dari Meida Padma Chandrika (2018)

Penelitian skripsi dari Meida Padma Chandrika ini berjudul *“Pengaruh Feminisme terhadap Kedudukan Perempuan Jepang Pasca Perang Dunia II”*. Penelitian ini berfokus membahas mengenai peran dan kedudukan perempuan Jepang sebelum Perang Dunia II dan pasca Perang Dunia II. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana masalah yang dihadapi kaum perempuan di Jepang dari zaman Tokugawa hingga Perang Dunia II, bagaimana perkembangan gerakan feminisme di Jepang hingga pasca Perang Dunia II, dan bagaimana perubahan yang terjadi terhadap peran dan kedudukan perempuan di Jepang pasca Perang Dunia II. Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, tradisi patriarki Jepang yang ketat membuat gerakan feminis di Jepang mengalami pasang surut. Meskipun demikian, ada secercah optimisme selama periode Meiji, yang memiliki dampak yang signifikan, terutama dalam bidang pendidikan. Selama periode Taisho, perjuangan semakin berpusat pada tujuan politik, yang dipimpin oleh Hiratsuka Raicho. perempuan mulai mengisi pekerjaan laki-laki selama perang, tetapi hal ini tidak mengubah ketidaksetaraan yang mereka hadapi. Setelah perang, reformasi di Amerika mempercepat perubahan dalam situasi perempuan Jepang, namun feminisme tetap menghadapi tekanan pemerintah. Di sisi lain, feminisme berhasil membebaskan pikiran perempuan Jepang dari belenggu patriarki. Persamaan penelitian Meida Padma Chandrika dengan penelitian penulis terdapat pada rumusan masalah yang membahas tentang masalah yang dihadapi kaum perempuan di Jepang pasca Perang Dunia II. Perbedaan penelitian Meida Padma Chandrika dengan penelitian penulis adalah fokus

pembahasan yang berbeda, penelitian penulis berfokus pada pasca Perang Dunia II. Sedangkan, fokus penelitian Meida Padma Chandrika lebih luas, yaitu dari zaman Tokugawa hingga pasca Perang Dunia II.

2. Hasil penelitian skripsi dari Winda Atmeiti (2013)

Penelitian skripsi dari Winda Atmeiti ini berjudul “*Kesetaraan Gender di Jepang*”. Penelitian ini berfokus membahas mengenai kesetaraan gender di Jepang, khususnya dalam bidang pendidikan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, sejak era Meiji, kesetaraan gender di Jepang telah meningkat, namun masih terjadi diskriminasi terhadap perempuan masih ada pada saat itu karena pengaruh konfusianisme yang kuat. Lalu setelah perang, perempuan di Jepang mendapatkan kesetaraan gender dalam pendidikan secara penuh. Hal ini meningkatkan peran perempuan dalam keluarga dan pekerjaan, di mana kaum ibu lebih menekankan pendidikan anak mereka. Kesetaraan gender juga memungkinkan perempuan mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan dan mampu bersaing dengan laki-laki. Persamaan penelitian Winda Atmeiti dengan penelitian penulis terdapat pada permasalahan yang diangkat yaitu, perjuangan perempuan Jepang untuk mendapatkan hak mereka sepenuhnya. Perbedaan penelitian Winda Atmeiti dengan penelitian penulis adalah fokus pembahasan yang berbeda, penelitian penulis berfokus pada pasca Perang Dunia II. Sedangkan, fokus penelitian Winda Atmeiti hanya membahas kesetaraan gender di bidang pendidikan di Jepang sebelum perang dan sesudah perang, lalu dampak dari pendidikan tinggi terhadap perempuan Jepang.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan terkait tema penelitian:

1. Diskriminasi terhadap perempuan di Jepang pasca Perang Dunia II.
2. Perjuangan yang dihadapi oleh perempuan di Jepang untuk mendapatkan hak mereka.
3. Masalah yang dihadapi perempuan di Jepang pasca Perang Dunia II.

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan, penulis memutuskan untuk membatasi penelitian pada periode pasca Perang Dunia II yang berfokus pada isu-isu diskriminasi terhadap perempuan di Jepang yang ditinjau dari aspek pendidikan, politik, dan pekerjaan. Dan perjuangan perempuan di Jepang untuk mendapatkan hak-hak dalam kehidupan mereka pada pasca Perang Dunia II, termasuk gerakan feminisme yang muncul. Serta dampak dari perubahan-perubahan tersebut terhadap kehidupan sehari-hari perempuan.

1.5 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat permasalahan dalam bentuk pertanyaan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di Jepang pasca Perang Dunia II?
2. Apa saja perjuangan yang dihadapi oleh perempuan di Jepang dalam mendapatkan hak-haknya?
3. Bagaimana masalah yang dihadapi kaum perempuan di Jepang pasca Perang Dunia II mempengaruhi kehidupan mereka dalam berbagai aspek?

1.6 Tujuan Penelitian:

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguraikan apa saja bentuk diskriminasi yang diterima oleh kaum perempuan di Jepang pasca Perang Dunia II.

2. Untuk menjelaskan perjuangan yang dihadapi oleh perempuan di Jepang untuk mendapatkan hak-hak mereka.
3. Untuk menjelaskan masalah yang dihadapi kaum perempuan di Jepang pasca Perang Dunia II yang mempengaruhi kehidupan mereka dalam berbagai aspek.

1.7 Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiono, 2017: 147).

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu melalui studi pustaka dengan sumber data yang berasal dari jurnal ilmiah, *e-book*.

1.8 Landasan Teori

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis menggunakan teori dari beberapa ahli untuk menjadi landasan dalam penulisan penelitian ini.

1.8.1 Kesetaraan Gender

Menurut Asako Osaki dalam New Commentators Bureau (解説委員室) (2023), menjelaskan bahwa:

ジェンダー平等とは、男性と女性が平等に権利と機会を享受し、責任を分かちあえる状態、意思決定に対等に参画できる状態を指します。
(<https://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/400/456465.html>)

Jendā byōdō to wa, dansei to josei ga byōdō ni kenri to kikai wo kyōju shi, sekinin wo wakachi aeru jōtai, ishi kettei ni taitō ni sankaku dekiru jōtai wo sashimasu.

Terjemahan:

Kesetaraan gender mengacu pada kondisi di mana laki-laki dan perempuan dapat menikmati hak dan kesempatan yang sama, berbagi tanggung jawab secara adil, dan berpartisipasi secara setara dalam pengambilan keputusan.

Kesetaraan gender adalah konsep "suci" yang sering digunakan oleh para aktivis sosial, feminis, politisi, bahkan pejabat negara. Dalam praktiknya, kata "kesetaraan gender" hampir sering dianggap sebagai kondisi ketidaksetaraan yang dialami perempuan. Akibatnya, istilah kesetaraan gender sering dihubungkan dengan konotasi diskriminasi terhadap perempuan, seperti subordinasi, penindasan, dan kekerasan.

Kesetaraan gender adalah kesetaraan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memiliki kesempatan, hak dan akses yang sama sebagai manusia untuk berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi dan sosial. Menurut jurnal Urgensi Undang-Undang tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (2014) karya Sali Susiana, kesetaraan gender tidak dipengaruhi oleh seksualitas atau jenis kelamin. Yang artinya kesetaraan gender bukan hanya milik perempuan saja tapi juga milik laki-laki, di mana laki-laki pun bisa menuntut hal serupa.

Uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender merupakan gagasan penting untuk mengakui hak dan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, dan sosial. Kesetaraan gender biasanya dianggap sebagai situasi ketidaksetaraan yang dialami oleh perempuan, namun tidak dipengaruhi oleh seksualitas atau jenis kelamin dan hal ini bisa menjadi milik laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, kesetaraan gender harus diwujudkan dalam tindakan konkret untuk mengatasi situasi yang tidak adil dan diskriminatif bagi kedua jenis gender.

1.8.2 Feminisme

Menurut Masako Murai dalam The Asahi Shimbun (2023), menjelaskan bahwa:

フェミニズムとは、あらゆる性差別からの解放を目的とした運動のことをいいます。狭義では女性人権運動、権利拡張・尊重主義をさします。
(<https://www.asahi.com/sdgs/article/14819871>)

Feminizumu to wa, arayuru seisa betsu kara no kaihō wo mokuteki to shita undō no koto wo imasu. Kyōgide wa josei jinken undō, kenri kakuchō sonchō shugi wo sashimasu.

Terjemahan:

Feminisme adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk membebaskan dari segala bentuk diskriminasi gender. Dalam arti yang lebih sempit, feminisme mengacu pada gerakan hak-hak perempuan, perluasan hak-hak dan penghormatan.

Menurut June Hannam dalam buku *Feminism*, kata feminisme bisa diartikan sebagai, pengakuan tentang ketidakseimbangan kekuatan antar-dua jenis kelamin, dengan peranan perempuan yang berada di bawah laki-laki. (June Hannam, 2007:22).

Menurut Wolf (dalam Sofia, 2009:13), feminisme adalah sebuah teori yang menyampaikan semua harga diri dan harga diri perempuan. Bagi Wolf, istilah "menjadi feminisme" harus diartikan sebagai "menjadi manusia". Lebih lanjut Budianta (dalam Sofia, 2009:13) menjelaskan feminisme sebagai sebuah kritik ideologis terhadap cara pandang yang mengabaikan isu-isu ketimpangan dan ketidakadilan dalam alokasi peran dan identitas sosial yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin.

Uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa feminisme adalah gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mengambil tindakan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan.

1.9 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kesetaraan gender dan perjuangan perempuan Jepang untuk mendapatkan hak mereka pasca Perang Dunia II.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang sejarah perjuangan hak-hak perempuan di Jepang pasca Perang Dunia II dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep kesetaraan gender.

1.10 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab dan ditulis untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian, yaitu sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, membahas latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, landasan teori, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka yang membahas tentang konsep gender, kesetaraan gender di Jepang pasca Perang Dunia II, peran perempuan Jepang pasca Perang Dunia II, dan feminisme di Jepang.

Bab III: Kesetaraan Gender dan Perjuangan Hak-hak Perempuan di Jepang Pasca Perang Dunia II, membahas tentang bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di Jepang pasca Perang Dunia II, perjuangan hak-hak perempuan di Jepang pasca Perang Dunia II, pengaruh masalah kaum perempuan terhadap kehidupan mereka.

Bab IV: Bab penutup yang berisi kesimpulan.